

**PERAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK TERHADAP
PEREKONOMIAN NASIONAL**

PERAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

Editor:

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2018

Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional/Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU (ed) —Ed. 1; Cet. 1.—Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

xiv + 158 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-712-4

Judul:
Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional
Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU

Copyrights © 2018
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2018
YOI: 1600.36.154.2018
Desain sampul: Iksaka Banu

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
<http://www.obor.or.id>
Yayasan Pustaka Obor (FB)
[pustakaobor_id](#) (IG)

KATA PENGANTAR

Dr. Indra Pahlevi

Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terbitnya buku yang berjudul *Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional* yang disusun oleh peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam penyempurnaan kebijakan dan pengembangan industri keuangan non bank di Indonesia. Industri keuangan non bank perlu terus dikembangkan karena sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah selama ini masih digantungkan pada APBN.

Struktur buku ini terdiri atas 7 (tujuh) bagian tulisan yang memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan mengenai peran industri keuangan non bank terhadap perekonomian nasional dari berbagai perspektif. Bagian pertama dan terakhir buku ini merupakan prolog dan epilog yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari buku ini dan telah dibuat oleh Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU selaku editor buku ini.

Dr. Indra Pahlevi

Saya sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis yang terdiri atas Edmira Rivani, Ari Mulianta Ginting, Juli Panglima Saragih, Rasbin, dan Sony Hendra Permana yang telah menghadirkan beragam warna mengenai Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dan telah memberikan masukan yang berharga bagi penyelesaian buku ini. Kepada penerbit disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, bukan saja dalam perumusan rancangan undang-undang khususnya, namun juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, September 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Bagian Kesatu	
Prolog: Peran Lembaga Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional: Suatu Pengantar	1
Oleh: Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU.	
Bagian Kedua	
Peran Lembaga Keuangan Nonbank Sebagai Sumber Pembiayaan Dalam Negeri	13
<i>Edmira Rivani</i>	
I. Pendahuluan	13
II. Peran dan Jenis Lembaga Keuangan Nonbank	15
III. Kondisi Lembaga Keuangan Nonbank di Indonesia	21
IV. Pentingnya Keberadaan Lembaga Keuangan Nonbank	30
V. Penutup	32
Daftar Pustaka	34
Bagian Ketiga	
Problematika Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia: Studi Kasus di PT. Sarana Bali Ventura	39
<i>Ari Mulianta Ginting</i>	
I. Pendahuluan	39

II.	Lembaga Keuangan Non Bank	42
III.	Gambaran Umum Perekonomian dan UMKM di Bali	46
IV.	Peran Perusahaan Ventura dalam Mendukung UMKM	49
V.	Problematika Perusahaan Ventura	52
VI.	Analisa <i>Strenght, Weakness, Opportunity</i> dan <i>Threat</i> (SWOT) terhadap Pt. Sarana Bali Ventura	54
VII.	Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	57
	Daftar Pustaka	59
Bagian Keempat		
Tantangan Perusahaan Pembiayaan dalam Persaingan Pasar Industri Jasa Keuangan di Indonesia		63
<i>Juli Panglima Saragih</i>		
I.	Pendahuluan	63
II.	Perkembangan Pembiayaan Non-Bank	70
III.	Persaingan Pasar Jasa Keuangan	76
IV.	Tantangan Ke Depan	79
V.	Penutup	86
	Daftar Pustaka	88
Bagian Kelima		
Upaya Meningkatkan Ekspor Industri Manufaktur melalui Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor		93
<i>Rasbin</i>		
I.	Pendahuluan	93
II.	Urgensi Lembaga Pembiayaan Industri Manufaktur	98
III.	Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terhadap Industri Manufaktur	102
IV.	Penutup	107
	Daftar Pustaka	109
Bagian Keenam		
Peran Perusahaan Modal Ventura Bagi UMKM di Indonesia		113
<i>Sony Hendra Permana</i>		

I.	Pendahuluan	113
II.	Pengertian dan Karakteristik Pembiayaan Modal Ventura	116
III.	Perkembangan Modal Ventura	122
IV.	Peluang dan Tantangan Perusahaan Modal Ventura	125
V.	Prospek Perusahaan Modal Ventura	131
VI.	Penutup	134
	Daftar Pustaka	136

Bagian Ketujuh

Epilog	141
---------------	-----

Pengembangan Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia: Catatan Akhir

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU.

Indeks	149
Tentang Editor	153
Tentang Penulis	155

DAFTAR TABEL

Bagian Kedua

Peran Lembaga Keuangan Nonbank sebagai Sumber Pembiayaan Dalam Negeri

Tabel 1.	Total Aset Lembaga Keuangan Nonbank (dalam triliun Rupiah)	22
Tabel 2.	Total Aset Lembaga Keuangan Nonbank (dalam triliun Rupiah)	23
Tabel 3.	Densitas dan Penetrasi Industri Perasurnasian Konvensional dan BPJS	24
Tabel 4.	Portofolio Investasi Dana Pensiun	26
Tabel 5.	Jumlah Dana Pensiun	27

Bagian Ketiga

Problematika Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia: Studi Kasus di PT. Sarana Bali Ventura

Tabel 1.	Portofolio Investasi kepada Pasangan Usaha PT. Bali Sarana Ventura Periode tahun 2012-2016	51
----------	--	----

Bagian Keempat

Tantangan Perusahaan Pembiayaan dalam Persaingan Pasar Industri Jasa Keuangan di Indonesia

Tabel 1.	Perkembangan Pasar Jasa Keuangan di Indonesia (2014-2016) (Rp Triliun)	77
Tabel 2.	Pangsa Pasar Terbesar Sektor Jasa Keuangan di Indonesia, Tahun 2016	78

DAFTAR GAMBAR

Bagian Kedua

Peran Lembaga Keuangan Nonbank sebagai Sumber Pembiayaan dalam Negeri

Gambar 1.	Perkembangan Aset Industri LKNB 2012 – 2016 (Rp Triliun)	15
Gambar 2.	Posisi Lembaga Keuangan Nonbank dalam Proses Transaksi	16
Gambar 3.	Struktur Lembaga Keuangan Nonbank	18
Gambar 4.	Komposisi Jumlah Pelaku Lembaga Keuangan Nonbank Triwulan IV- 2017	21
Gambar 5.	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	25
Gambar 6.	Pembiayaan PP Berdasarkan Jenis Usaha	29
Gambar 7.	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura (Triliun Rupiah)	30

Bagian Ketiga

Problematika Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia: Studi Kasus di PT. Sarana Bali Ventura

Gambar 1.	Struktur Kelembagaan Pembiayaan Lembaga Keuangan	44
Gambar 2.	Perkembangan Unit Usaha dan Nilai Produksi IKM di Provinsi Bali pada periode tahun 2012-2016	47
Gambar 3.	Penyaluran Kredit Pembiayaan menurut Sektor Ekonomi periode Tahun 2012-2016	52
Gambar 4.	Matriks SWOT PT. Sarana Bali Ventura Versus Perbankan	55

Gambar 5. Alternatif Kebijakan Berdasarkan Matriks SWOT	56
---	----

Bagian Keempat

Tantangan Perusahaan Pembiayaan dalam Persaingan Pasar Industri Jasa Keuangan di Indonesia

Gambar 1. Perkembangan Kinerja Pembiayaan di Indonesia Tahun 2017	73
---	----

Bagian Kelima

Upaya Meningkatkan Ekspor Industri Manufaktur Melalui Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor

Gambar 1. Perkembangan Ekspor Manufaktur, Total Ekspor, PDB dan Nilai Tukar Periode 2005 – 2014	95
Gambar 2. Pertumbuhan Ekspor Industri Manufaktur Periode 1986-2016	96
Gambar 3. Perkembangan Kredit Perbankan ke Sektor-sektor Ekonomi Periode 2011-Mei 2018	100
Gambar 4. Perkembangan NPL Bank Umum ke Sektor-sektor Ekonomi Periode 2011-Mei 2018	101
Gambar 5. Perkembangan Pembiayaan dan Pinjaman, Penjaminan, dan Asuransi yang Disalurkan oleh LPEI Periode Mei 2017-Mei 2018 (Rp Miliar)	103
Gambar 6. Perkembangan Pembiayaan dan Pinjaman dari LPEI ke Sektor Ekonomi Periode Mei 2017- Mei 2018 (Rp Miliar)	104
Gambar 7. Perkembangan Pembiayaan LPEI Berdasarkan Penggunaan Dana Periode Mei 2017-Mei 2018	106
Gambar 8. Perkembangan Kualitas Pembiayaan LPEI Periode Mei 2017-Mei 2018	107

Bagian Keenam

Peran Perusahaan Modal Ventura bagi UMKM di Indonesia

Gambar 1.	Aset Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Periode Desember 2017 (dalam triliun rupiah)	124
Gambar 2.	Sumber Pendanaan PT. Sarana Jatim Ventura Tahun 2012-2016	128

BAGIAN KESATU

PROLOG:

PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL: SUATU PENGANTAR

Carunia Mulya Firdausy

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2012 mengalami perlambatan. Dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015—2019 sebesar 7 persen pertahun, capaian pertumbuhan ekonomi ternyata masih berkisar 5 persen. Pada tahun 2015, misalnya, capaian pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 4,8 persen, kemudian meningkat menjadi 5,01 persen pada tahun 2016 dan 5,1 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya mampu mencapai kisaran 5,2—5,4 persen.

Banyak faktor yang memengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode di atas. Selain faktor eksternal menyangkut dinamika ekonomi global yang tidak pernah menentu, faktor internal juga turut memengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya pengaruh kedua faktor eksternal dan internal ini menyebabkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi nasional, baik berupa konsumsi, investasi, penerimaan pemerintah, maupun net ekspor tidak mampu berkontribusi optimal untuk

menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan sebesar 7 persen per tahun.

Untuk mengatasi semakin melambatnya kontribusi dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di atas, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan ekonomi. Selain 16 paket kebijakan ekonomi, pemerintah juga gencar mencanangkan berbagai program-program strategis antara lain program pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk *start-up company*, pengembangan ekspor, pengembangan pendidikan dan SDM, pembangunan wilayah, serta ketahanan pangan dan energi. Program-program tersebut tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Namun sayangnya, sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan dan program tersebut di atas selama ini masih digantungkan pada APBN. Pada tahun 2018, misalnya, dari total pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp 1.895,7 Triliun, pemerintah berencana mengeluarkan pembiayaan pembangunan bersumber dari APBN sebesar Rp 2.220,7 Triliun. Pengeluaran ini meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.454,5 Triliun dan transfer daerah sebesar dan dana desa sebesar Rp 766,2 Triliun. Khusus untuk pembangunan infrastruktur selama tahun 2015-2019, dari total anggaran yang diperlukan sebesar Rp 4.796,2 triliun, sebesar 41,3 persen akan didanai dari APBN. Sedangkan sisanya 58,7 persen direncanakan bersumber dari pendanaan BUMN (22,2 persen) dan sektor swasta (36,5 persen).

Besarnya sumber pembiayaan pembangunan berasal dari APBN di atas memiliki beberapa implikasi. Pertama, menimbulkan kondisi fiskal yang tidak sehat, apalagi jika sumber pendapatan dari sektor pajak yang direncanakan tidak dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan cara mengatasinya yakni dengan cara berutang. Kedua, besarnya pembiayaan pembangunan dari sumber APBN memberikan implikasi berbagai program pemerintah yang telah

ditetapkan dapat berjalan lambat khususnya jika sumber penerimaan yang direncanakan diperoleh terbatas sehingga selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam tahun berjalan. Ketiga, ketergantungan pembiayaan dari APBN menimbulkan keterbatasan dalam memperluas kegiatan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengurangi ketergantungan kegiatan ekonomi mutlak diperlukan sumber pembiayaan di luar APBN.

Dari berbagai sumber pembiayaan alternatif dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan nasional di luar APBN yakni pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan non-bank. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016), aset lembaga pembiayaan non-bank pada tahun 2016 mencapai lebih dari Rp 450-an triliun. Bahkan menariknya, belajar dari pengalaman negara Paman Sam Amerika keberadaan lembaga keuangan non-bank mampu bertahan sebagai sumber pembiayaan yang tangguh pada saat negara ini mengalami krisis ekonomi tahun 2008.

Hal ini terlihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh lembaga keuangan non-bank atau lebih dikenal dinegara tersebut sebagai industri keuangan non-bank (INKB) yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2012, aset lembaga tersebut mencapai Rp 1.177,74 triliun. Aset ini meningkat hampir 14 persen pada tahun 2013 menjadi Rp 1.342,36 triliun. Tahun 2014 dan 2015 juga mengalami peningkatan di mana asetnya sebesar Rp 1.560,35 triliun dan Rp 1.664,24 triliun (atau meningkat 6,6 persen). Untuk tahun 2016, aset lembaga keuangan non-bank mencapai Rp 1.907 triliun atau meningkat 14,5 persen dibandingkan tahun 2015. Adapun lembaga keuangan non-bank dimaksud antara lain lembaga asuransi, dana pensiun, lembaga khusus (LJKK), industri jasa penunjang IKNB (IJPIKNB), dan lembaga keuangan mikro (LKM).

Buku ini bertujuan untuk mendiskusikan peran lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Secara lebih khusus terdapat lima topik yang didiskusikan dalam buku ini. Bab 2 berikut ini didiskusikan

peran lembaga keuangan bukan bank sebagai sumber pembiayaan dalam negeri. Bab 3 mengkaji Problematika Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia belajar dari Kasus di PT Sarana Bali Ventura. Bab 4 menguraikan Tantangan Perusahaan Pembiayaan dalam Persaingan Jasa Keuangan di Indonesia. Bab 5 mengungkapkan Upaya Meningkatkan Ekspor Industri Manufaktur melalui Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor. Bab 6 mendiskusikan Peran Perusahaan Modal Ventura Bagi UMKM di Indonesia. Akhirnya, catatan akhir dalam pengembangan lembaga keuangan non-bank di Indonesia diberikan pada Bab 7.

II. SISTIMATIKA BUKU

Seperti dijelaskan di atas, buku ini terdiri dari 7 Bab. Bab pertama dijelaskan tentang latarbelakang pentingnya lembaga keuangan non-bank dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan ekonomi nasional. Diungkapkan secara singkat bahwa lembaga keuangan non-bank memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan kegiatan ekonomi nasional. Dalam bab ini juga diungkapkan implikasi dari ketergantungan pembiayaan pembangunan pada sumber APBN.

Bab 2 membahas peran lembaga keuangan bukan bank sebagai sumber pembiayaan dalam negeri. Dalam bab ini diungkapkan antara lain bahwa lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit.

Prolog

Dalam kegiatan usahanya, lembaga ini umumnya bersifat kontraktual (*contractual institution*) yaitu menaikkan dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian, dan memobilisasikan sumber keuangan dalam negeri untuk membiayai pembangunan. Bagi pemerintah lembaga ini berperan antara lain dalam peningkatan akses terhadap jasa keuangan, pengurangan biaya untuk memperoleh jasa keuangan, meningkatkan persaingan antar penyedia jasa keuangan agar produk dan jasa lebih efisien melalui biaya yang lebih rendah, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Dengan perannya yang penting terhadap perekonomian nasional, lembaga keuangan bukan bank memiliki jenis-jenis yang berbeda, meliputi pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Khusus untuk lembaga jasa keuangan lain terdiri dari lembaga penjaminan kredit, lembaga penjaminan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), lembaga pembiayaan sekunder perumahan, pegadaian, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), dan lembaga keuangan mikro (LKM).

Bab 3 ini mengupas bagaimana problematika pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan non bank dalam mendukung pelaku usaha dalam hal permodalan khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan studi kasus PT. Sarana Bali Ventura. Kegiatan perusahaan ini fokus kepada 6 bidang usaha yang produktif, diantaranya adalah usaha tani, industri kecil dan menengah, usaha perdagangan, usaha jasa, usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif. Sedangkan jenis skema pembiayaan yang dilakukan perusahaan ini yaitu kerja sama kemitraan, kerja sama inti-plasma, skema kerja sama payung, dan skema pembiayaan kepada suplier sesuai nota penjualan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan di sektor usaha tani, perusahaan ini telah membangun kemitraan dengan berbagai

kelompok peternak di beberapa kabupaten di Bali, khususnya usaha penggemukan sapi Bali dengan sistem bagi hasil murni. Bagi hasil murni ini dilakukan tanpa adanya anggunan tambahan disertai disamping mulai dari pengadaan bakalan, pemeliharaan sapi sampai dengan penjualan sapi.

Bab 4 menguraikan Tantangan Perusahaan Pembiayaan dalam Persaingan Jasa Keuangan di Indonesia. Tantangan yang dibahas antara lain bahwa OJK sudah membuka peluang terkait pembiayaan ke sektor produktif namun masih sedikit yang beralih. Selama ini perusahaan *multifinance* kurang berani dalam membiayai kredit produktif, padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuka peluang *multifinance* untuk membiayai sektor produktif seperti kredit usaha rakyat (KUR), sektor maritim termasuk juga sektor kelautan dan perikanan. Selain itu tantangan lain berupa kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, tingginya tingkat persaingan, dan tantangan yang menyangkut segmen pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan diungkapkan bahwa konsumen sarat dengan persaingan sangat ketat yang tidak hanya persaingan intern-perusahaan pembiayaan, tetapi juga antara perusahaan pembiayaan dengan perbankan sebagai institusi jasa keuangan yang juga memberikan kredit konsumsi (konsumen).

Bab 5 mengungkapkan Upaya Meningkatkan Ekspor Industri Manufaktur Melalui Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor (LPEI). Dalam bab ini secara singkat didiskusikan tentang urgensi lembaga pembiayaan yang kompetitif bagi industri manufaktur, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh LPEI sebagai lembaga pembiayaan bagi industri manufaktur berorientasi ekspor. Pentingnya pembahasan LPEI ini dimaksudkan agar masalah menurunnya daya saing industri manufaktur dapat di atasi. Hal ini karena sampai saat ini akses pembiayaan masih menjadi masalah dalam pengembangan industri manufaktur. Selain itu, masalah pembiayaan juga menyebabkan industri manufaktur sulit mengimbangi perkembangan persaingan

Prolog

industri global. Hal ini yang membuat pertumbuhan industri manufaktur tertinggal dari sektor ekonomi yang lain.

Bab 6 mendiskusikan Peran Perusahaan Modal Ventura (PMV) Bagi UMKM di Indonesia. Diungkapkan dalam bab ini bahwa PMV merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang sangat sesuai bagi UMKM untuk mengatasi permasalahan kesulitan pada akses keuangan. Hal ini karena PMV memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki lembaga keuangan lainnya. Karakteristik tersebut adalah *pertama* PMV dapat masuk pada sektor usaha yang *feasible* untuk dibiayai meskipun usaha tersebut belum *bankable*. Selain itu, PMV juga mengembangkan pola pendampingan terhadap pasangan usaha sehingga pelaku usaha yang dibiayai merasa tidak sendirian dalam membangun usaha tersebut. Juga dibahas dalam bab ini bahwa PMV memiliki kegiatan usaha lebih variatif, antara lain dapat melalui penyertaan saham, obligasi konversi, dan pembiayaan usaha produktif.

Akhirnya, catatan akhir dalam pengembangan lembaga keuangan non-bank di Indonesia diberikan pada Bab 7. Catatan akhir ini merupakan rangkuman dari 5 bab yang didiskusikan sebelumnya. Dengan adanya catatan akhir ini diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan program konkret yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan bukan bank kini dan ke depan dalam mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan bagi kebijakan dan program pembangunan nasional.

EPILOG

PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DI INDONESIA: CATATAN AKHIR

Carunia Mulya Firdausy

Lembaga keuangan non-bank merupakan salah satu sumber pembiayaan program pembangunan nasional. Namun sayangnya potensi lembaga keuangan non-bank ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal aset lembaga pembiayaan non bank pada tahun 2016 mencapai Rp 450-an triliun (OJK, 2016). Selain memiliki aset yang cukup besar, salah satu kelebihan dari lembaga keuangan non bank tersebut adalah memiliki *Non Performing Financing* (NPF) yang relatif terjaga selalu di level 3,17 atau dibawah batas maksimal 5 persen. Selain itu, *Return on Asset* (ROA) masih dalam kondisi positif dan berada pada level 4,09 persen. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan non bank mutlak diperlukan.

Buku ini bertujuan untuk mendiskusikan peran lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Secara lebih khusus terdapat lima topik yang didiskusikan dalam buku ini. Bab 2 mendiskusikan peran lembaga keuangan bukan bank sebagai sumber pembiayaan dalam negeri. Bab 3 mengkaji Problematika Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia belajar dari Kasus di PT Sarana Bali Ventura. Bab 4 menguraikan Tantangan Perusahaan Pembiayaan dalam

Persaingan Jasa Keuangan di Indonesia. Bab 5 mengungkapkan Upaya Meningkatkan Ekspor Industri Manufaktur Melalui Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor. Bab 6 mendiskusikan Peran Perusahaan Modal Ventura Bagi UMKM di Indonesia. Bab ini ditujukan untuk mendiskusikan beberapa catatan akhir dari seluruh analisis dan temuan yang diungkapkan dari bab-bab sebelumnya.

I. PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK KINI DAN MENDATANG

Lembaga keuangan non-bank atau juga dapat disebut Industri Keuangan Bukan Bank (IKBB) memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Dengan menyediakan jasa keuangan tambahan dan alternatif, lembaga ini mampu memperbaiki akses keuangan umum di seluruh sistem. Keberadaan lembaga ini juga membantu mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang, yang seringkali menjadi tantangan dalam tahap-tahap awal pembangunan sektor keuangan berorientasi bank.

Namun kini dan ke depan, keberadaan lembaga ini perlu untuk terus dikembangkan untuk melibatkan institusi lainnya seperti pasar modal, dana pensiun, reksadana, perusahaan asuransi, perusahaan sewa guna usaha, dan dana modal usaha di Indonesia. Pentingnya pelibatan lembaga keuangan non-bank ini antara lain karena lembaga-lembaga ini memang lebih terarah untuk menanggung beberapa jenis risiko.

Dengan adanya pelibatan lembaga-lembaga tersebut, lembaga ini tidak saja dapat mengurangi kerentanan sektor keuangan terhadap guncangan di masa mendatang, melainkan juga mampu membantu mempermudah capaian program pembangunan yang ditetapkan, seperti program pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk *start up company*, serta ketahanan pangan.

Epilog

Pentingnya peran lembaga keuangan non-bank bagi UMKM, misalnya, didasarkan pertimbangan banyaknya jumlah UMKM. Apalagi akses UMKM terhadap lembaga formal perbankan juga masih belum optimal. Dari kajian terhadap PT. Sarana Bali Ventura di Provinsi Bali ditemukan beberapa masalah yang dihadapi UMKM ini. Masalah tersebut menyangkut tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi, kurangnya promosi dan pemasaran terhadap produk-produk pembiayaan, ditambah lagi ancaman dari Perbankan sejak digulirkannya program pemerintah kredit KUR dengan bunga rendah dan syarat yang lebih ringan. Masalah lain yang dihadapi adalah risiko usaha dari kredit PT. Sarana Bali Ventura yang relatif lebih tinggi untuk saat ini, sehingga hal ini juga berdampak terhadap premi bunga yang tinggi terhadap pada kreditor.

Untuk mengatasi masalah tersebut, PT. Sarana Bali Ventura sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang giat menyalurkan kredit kepada sektor UMKM agar fokus kepada pendampingan usaha kepada UMKM. Hal ini dikarenakan pihak perbankan tidak memiliki pendampingan kepada sektor UMKM. Kebijakan lain yakni pentingnya kegiatan pemasaran kredit produk perusahaan ini kepada para pelaku *start up industry* yang ada di Provinsi Bali. Apalagi para pelaku industri tersebut rata-rata belum memiliki laporan keuangan dan tidak adanya jaminan (*collateral*) yang dimiliki untuk dijamin.

Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang cocok dalam mengembangkan sektor UMKM di Indonesia. Hal ini paling tidak karena alasan berikut. Pertama, PMV memiliki karakteristik usaha yang berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya. Dalam hal ini PMV ikut terlibat dalam membantu manajemen PPU untuk mengembangkan usahanya. Kedua, PMV mampu membiayai usaha yang *feasible* meskipun *non-bankable*. Sehingga PMV dapat menjadi mitra bagi UMKM yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan untuk berkembang bersama.

Saat ini perkembangan industri modal ventura tidak sebesar industri jasa keuangan formal lainnya. PMV hanya mampu berkontribusi sebesar 0,11 persen terhadap total aset seluruh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank di Indonesia. Ini antara lain disebabkan permasalahan pendanaan yang dialami PMV berasal dari bank. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan pembiayaan yang disalurkan PMV menjadi mahal. Selain itu juga terjadi *mismatch* karena sumber modal PMV berasal dari pinjaman bank yang berjangka pendek, sementara PMV harus membiayai PPU dengan jangka waktu menengah dan panjang. Berbagai permasalahan lainnya yaitu ketatnya persaingan dengan lembaga pembiayaan lain, tingginya angka pembiayaan bermasalah, rendahnya pengenalan masyarakat terhadap PMV, dan kesulitan mendapatkan SDM yang sesuai kebutuhan menambah beban bagi modal ventura untuk berkembang.

Namun demikian, potensi modal ventura untuk berkembang masih sangat terbuka. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi menyebabkan bisnis *start up* bermunculan, khususnya di bidang *e-commerce* dan transportasi. Perusahaan-perusahaan dalam fase *seed* dan *early stage* merupakan pangsa pasar yang sangat sesuai bagi PMV. Potensi inilah yang juga menyebabkan PMV asing mulai masuk ke Indonesia, di samping Indonesia juga merupakan pasar yang sangat besar. Untuk itulah, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan baik dalam penyusunan kebijakan yang mendorong perkembangan industri modal ventura maupun aspek pendanaannya. Diharapkan dengan semakin meningkatnya industri ini akan menciptakan wirausaha-wirausaha baru yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, pada saat ini masih ditemukan banyak pelaku industri *multifinance* yang tidak bisa terlepas dari pembiayaan sektor konsumsi (termasuk pembiayaan konsumsi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua). Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menilai saat ini dan ke depan pelaku

industri *multifinance* harus lebih mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif. Pembiayaan ini masih banyak yang bergantung pada sektor konsumsi. Tujuannya agar industri keuangan non-bank berkembang disamping meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dari aspek pembiayaan (*financing*). Namun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi sebagai berikut.

Pertama adalah bahwa OJK sudah membuka peluang terkait pembiayaan ke sektor produktif namun masih sedikit yang beralih. Selama ini perusahaan *multifinance* kurang berani dalam membiayai kredit produktif, padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuka peluang *multifinance* untuk membiayai sektor produktif seperti kredit usaha rakyat (KUR), sektor maritim termasuk juga sektor kelautan dan perikanan. Pihak APPI menilai, keberanian perusahaan *multifinance* dalam membiayai kredit produktif akan mendorong *multifinance* lebih cepat keluar dari zona nyaman pembiayaan konsumen yang selama ini dinikmati.

Kedua, industri pembiayaan *multifinance* juga dihadapkan pada tantangan menyiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi baik di tengah zaman milenial. APPI menilai, saat ini banyak pekerja di industri *multifinance* yang tidak bisa bertahan lama menghadapi target tertentu. Tantangan SDM sebagian besar terletak pada ketidakmampuan menghadapi tekanan atau target-target tertentu yang tidak rasional dan tidak melihat kondisi ekonomi, ditambah zaman milenial saat ini di mana banyak pekerja yang kerja di perusahaan hanya 2 hingga 3 tahun lalu pindah.

Ketiga, APPI berharap, pada masa mendatang para pelaku industri *multifinance* juga dapat bersaing di tengah persaingan global di mana kepercayaan nasabah menjadi kunci utama keberhasilan industri *multifinance* di pasar. Sebuah sistem LKNB yang dikembangkan dengan baik berpotensi memenuhi sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang ini dengan jalan membawa stabilitas lebih jauh pada sistem keuangan, mengurangi biaya jasa keuangan secara keseluruhan

dan menyingkap sumber daya domestik untuk tujuan pembangunan. Sektor LKNB yang kuat akan memungkinkan Pemerintah menempatkan obligasi di pasar domestik, menyediakan pembiayaan dalam rupiah untuk keperluan infrastruktur, menyediakan pendanaan bagi UKM (sehingga menciptakan lapangan kerja) dan meningkatkan keamanan keuangan rakyat Indonesia dengan memungkinkan akses ke berbagai macam produk. Sektor swasta di Indonesia perlu memiliki akses ke berbagai jenis modal, seperti modal risiko dari pasar modal, pinjaman jangka pendek dari bank, serta pendanaan jangka panjang melalui pasar modal dan investor lembaga. Jasa sewa guna usaha dan anjak piutang misalnya, dapat membantu menyediakan pembiayaan berjangka bagi sektor swasta, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering mengalami keterbatasan dalam hal agunan.

Tantangan lainnya adalah bahwa segmen pembiayaan konsumen sarat dengan persaingan sangat ketat yang tidak hanya persaingan intern-perusahaan pembiayaan, tetapi juga antara perusahaan pembiayaan dengan perbankan sebagai institusi jasa keuangan yang juga memberikan kredit konsumsi (konsumen). Perbankan sudah lama memberikan/menyalurkan kredit konsumsi (kredit kepemilikan kendaraan bermotor, dan lain-lain). Masalah lain yang dihadapi perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut, yakni rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang membengkak lantaran debitur tak bisa mengembalikan pembiayaan.

Untuk sektor industri manufaktur ditemukan bahwa kredit sektor perbankan ke sektor industri manufaktur lebih rendah dibandingkan kredit ke sektor perdagangan. Ini disebabkan oleh beberapa persyaratan yang diajukan oleh sektor perbankan yang sulit dipenuhi oleh pelaku-pelaku usaha di sektor industri manufaktur. Untuk mengisi celah tersebut, perlu adanya lembaga pembiayaan bagi sektor industri manufaktur yang mudah untuk diakses, seperti lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI).

Epilog

Adanya lembaga pembiayaan tersebut diharapkan dapat mendorong daya saing industri manufaktur khususnya berorientasi ekspor. Hal ini bisa dilihat dari pembiayaan dan pinjaman yang dikeluarkan oleh LPEI terhadap sektor industri manufaktur yang terus meningkat. Pembiayaan dan pinjaman tersebut sebagian besar didominasi oleh modal kerja dan investasi, dua komponen utama yang dibutuhkan oleh industri manufaktur. Namun, dukungan pemerintah diperlukan agar LPEI lebih berperan lagi dalam mendukung ekspor industri manufaktur seperti kebijakan yang bersifat relaksasi atas beberapa *prudential regulation* bagi LPEI.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan keberadaan lembaga keuangan non-bank dan/atau industri keuangan non-bank sebagai sumber pembiayaan alternatif dalam mendukung dan melaksanakan program pembangunan nasional. Tanpa optimalisasi keberadaan dan peran lembaga keuangan non bank dipastikan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan akan mudah tercapai.

INDEKS

A

akses pembiayaan, 8, 48, 97, 105,
107
anjak piutang, 14, 19, 28, 31, 32, 44,
64, 66, 67, 80, 81, 146
asuransi, 5, 7, 14, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 31, 32, 43, 64, 78, 79, 81,
102, 103, 104, 129, 142

B

bankable, 9, 47, 48, 49, 116, 123, 125
bantuan manajemen, 117, 126
Bapindo, 98, 99, 102
berisiko tinggi, 121
bunga bank, 81, 97

C

collateral, 48, 58, 87, 120, 142

D

dana pensiun, 5, 7, 14, 17, 18, 20, 21,
22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 43, 64,
daya penyebaran, 94
daya saing, 8, 97, 98, 99, 101, 105,
107, 115, 147
derajat kepekaan, 94
deregulasi, 106

E

early stage, 115, 131, 132, 133, 134,
144
ekspor, 3, 4, 6, 7, 8, 19, 44, 65, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
105, 107, 108, 115, 142, 146,
147

F

feasible, 9, 49, 116, 118, 123, 125,
130, 134, 143
financial intermediaries, 6, 16, 40
financial literate, 40

H

hibah, 99

I

increasing return to scale, 93
index financial access, 40
investee company, 45, 117
industri jasa, 5, 21, 22, 32, 63, 86,
127, 134, 144
industri keuangan non bank, 5, 41,

Indeks

- 63, 64, 72, 74, 79, 81, 82, 86,
103, 147
- industri manufaktur, 6, 8, 9, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 105, 106, 107, 108, 142,
146, 147
- industri ritel, 99
- intermediasi, 15, 31, 43, 86, 99
- investasi, 3, 13, 14, 23, 25, 26, 28, 30,
31, 32, 43, 50, 51, 52, 54, 63, 65,
72, 81, 84, 97, 99, 105, 107, 115,
120, 121, 132, 133, 142, 147
- J**
- jaminan fidusia, 85
- K**
- kendaraan bermotor, 28, 67, 72, 74,
75, 79, 82, 85, 87, 144, 146
- kontraktual, 7, 13, 17, 31
- konsumen, 8, 44, 63, 65, 67, 69, 70,
71, 74, 75, 79, 80, 82, 84, 85, 86,
87, 145, 146
- kredit macet, 85, 100
- kredit pembiayaan, 51, 52
- kompetensi, 8, 80, 131, 145
- L**
- leasing*, 19, 66, 75
- lembaga keuangan, 3, 5, 6,
- lembaga pembiayaan ekspor, 6, 7, 8,
19, 44, 65, 93, 98, 102, 108
- M**
- merger, 84, 98
- modal,
bantuan, 114, 126
barang, 19, 44, 65, 66, 70, 71
dana, 32, 45, 129, 142
pasar, 7, 13, 14, 16, 18, 31, 32,
43, 64, 68, 72, 77, 78, 80, 81,
133, 142, 146
pembiayaan, 28, 45, 49, 53, 64,
67, 72, 83, 116, 118, 120,
126, 129
penanaman, 116
perjanjian, 68
suntikan, 114, 132
- modal kerja, 28, 72, 82, 85, 97, 105,
108, 129, 147
- modal ventura, 6, 9, 14, 19, 29, 30,
31, 32, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 64,
65, 67, 68, 74, 81, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127,
129, 130, 131, 133, 134, 135,
142, 143, 144
- multifinance*, 8, 63, 65, 69, 71, 72, 78,
79, 80, 82, 83, 84, 144, 145
- N**
- nonmigas, 94
- non performing financing*, 41, 64, 83,
85, 127, 130, 141, 146
- non performing loan*, 100
- O**
- obligasi, 14, 16, 23, 26, 32, 49, 64,
77, 80, 81, 116, 117, 125, 146
- obligasi konversi, 9, 45, 116, 117,
125
- Otoritas Jasa Keuangan, 44, 45, 65,

71, 75, 76, 79, 102, 117, 123,
124, 129, 130, 145

P

pasangan usaha, 9, 50, 51, 68, 116,
117, 118, 125, 126, 128, 130
pegadaian, 7, 19, 20, 64, 102
pembiayaan infrastruktur, 44, 65, 69,
74, 85, 86, 123
pembiayaan konsumen, 44, 67, 69,
70, 74, 75, 79, 80, 82, 145, 146
pendampingan, 9, 49, 50, 54, 57, 58,
116, 117, 123, 125, 130, 131,
143
pendanaan, 4, 17, 30, 31, 64, 71, 80,
81, 84, 114, 121, 125, 127, 128,
129, 130, 131, 134, 135, 144,
146
pendapatan operasional, 41
penyertaan saham, 9, 45, 49, 68,
116, 117, 118, 125
perbankan, 8, 13, 19, 31, 40, 41, 43,
45, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 63,
68, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 89, 99, 100,
101, 103, 105, 106, 107, 118,
120, 123, 125, 126, 127, 128,
130, 131, 143, 146
permodalan, 7, 42, 45, 48, 53, 54, 55,
64, 77, 82, 83, 84, 87, 113, 114,
127, 128, 129, 133
persaingan pasar, 63, 76, 80
perusahaan pembiayaan, 6, 8, 17, 28,
35, 44, 49, 53, 63, 64, 65, 66, 67,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
123, 129, 141, 144, 146
perusahaan dana pensiun, 64

pinjaman, 43, 53, 57, 64, 68, 71, 77,
83, 99, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 120, 121, 126, 127, 134,
143, 144, 146, 147
PMV, 9, 22, 68, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123,
125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 143, 144
portofolio, 14, 26, 32, 50, 51, 108
premi, 20, 23, 24, 25, 58, 143
produktivitas, 40, 94
produk domestik bruto, 24, 94

R

relaksasi, 106, 108, 147
return on asset, 41, 141

S

Sakernas, 94
seed and early stage, 115, 131, 132,
133, 134, 144
sektor jasa keuangan, 13, 78, 85, 86
sektor perdagangan, 30, 51, 57, 94,
100, 105, 107, 146
sektor produktif, 8, 41, 79, 85, 145
sewa guna usaha, 14, 19, 28, 31, 32,
44, 65, 66, 80, 142, 146
share, 84, 95, 98, 105, 124, 133
start up, 4, 33, 41, 49, 54, 55, 57, 58,
115, 129, 131, 132, 133, 134,
142, 143, 144

T

the rural credit cooperatives, 41

U

UMKM, 4, 6, 7, 9, 33, 41, 42, 45, 46,

47, 48, 49, 57, 58, 80, 85, 87,
108, 113, 114, 115, 116, 119,
123, 125, 128, 129, 133, 134,
142, 143, 146

Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, 13, 35, 43

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992
Tentang Usaha Perasuransian,
20, 35

Undang-Undang No. 2 Tahun 2009
Tentang Lembaga Pembiayaan
Ekspor

Indonesia, 109

TENTANG EDITOR

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU. adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanegara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree* di bidang *Agricultural Development Economics* (MADE) dari *Australian National University*, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi pidato Presiden RI bidang ekonomi. kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputi Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology* (NAM), serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology* (ASEAN-COST).

Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) konsultan penelitian *Asian Development Bank* (ADB), *United Nations for Economic and Social for Asia and Pacific* (UN-ESCAP), *International labour Organization* (ILO), UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS, dan *World Bank*; (c)

Tentang Editor

dosen dan pembimbing mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3, untuk mahasiswa di beberapa universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) mitra bestari Buletin Ilmu Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, AS; (g) editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *coordinator East Asian Development Network* (EADN) untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank* (ADB) sejak tahun 2010.

Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank* (ADB), *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies* (ISEAS), ILO, dan UN-ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN-ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah cmfirdausy@gmail.com dan carunia_firdausy@yahoo.com.

TENTANG PENULIS

Ari Mulianta Ginting adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Ekonomi dengan konsentrasi Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Moneter diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Moneter. Tahun 2017 memulai kuliah Doktor Ilmu Ekonomi dengan Konsentrasi *Public Policy* di Universitas Trisakti. Bekerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer sejak tahun 2008 hingga sekarang untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi di Universitas Pelita Harapan dari tahun 2015 hingga sekarang. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail : ari.ginting@dpr.go.id

Edmira Rivani, menyelesaikan studi S-1 pada jurusan Statistika-Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S-2) pada Jurusan Statistika Terapan-Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Bekerja di Sekretariat

Tentang Penulis

Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian. Tahun 2011 penulis terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, kemudian pada tahun 2015 penulis terlibat dalam penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas. Penulis juga menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik seperti: Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) Dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi (2014), Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN *China Free Trade Area* (2015), Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Berkelanjutan (2015), dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: edmira.rivani@dpr.go.id atau rif_green@yahoo.com.

Juli Panglima Saragih, lahir di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, tanggal 21 Juli 1964. Saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan IVC dengan jabatan Fungsional Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak 1990. Pendidikan formal yang sudah ditempuh adalah Sarjana (S-1) dari FISIP Universitas Negeri Padjadjaran Bandung Tahun 1988. Pascasarjana (S-2) Magister Manajemen (MM) dari Universitas Nusantara Jakarta, tahun 1999. Aktif menulis di surat kabar nasional dan daerah, dan beberapa majalah dalam negeri sejak 1992. Menulis buku tentang: 'Desentralisasi fiskal ...' yang diterbitkan oleh Penerbit PT. Ghalia Indonesia (GI), Jakarta, April 2003, dan lain-lain. Aktif melakukan penelitian di dalam negeri, dan mengikuti berbagai seminar, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan peneliti dan keparlememen. Anggota Tim Asistensi Pembuatan UU: UU tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU tentang Perlindungan Konsumen; UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU tentang Perindustrian; UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU tentang Lembaga Keuangan Mikro; UU

Tentang Penulis

tentang Perasuransian; UU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. Melakukan kunjungan kerja kedinasan ke luar negeri tentang keparlemenan: Amerika Serikat (2000) dan (2008), Australia (2006), Canada (2015), India (2004), Philippina (1999), Thailand (1999), Vietnam (1999) dan (2018).

Rasbin menyelesaikan pendidikan S-1 Teknologi Pertanian Departemen Teknologi Industri di Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2004, pendidikan Master Sains (S-2) Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya dengan Kekhususan Ekonomi Perdagangan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Nilai Tukar, Upah Tenaga Kerja, dan Daya Saing Industri Manufaktur” (2017), “Alternatif Pembiayaan Ekonomi Kreatif di Indonesia” (2017), dan “Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi: Studi Kasus di Indonesia” (2016). Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail : rasbin@dpr.go.id.

Sony Hendra Permana adalah Peneliti Muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan kepakaran Kebijakan Ekonomi. Penulis menyelesaikan studi S-1 di Universitas Persada Indonesia YAI dan S-2 di Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Tulisan yang pernah diterbitkan dalam jurnal dan buku antara lain berjudul: “Prospek Pelaksanaan Redenominasi di Indonesia”, “Peran Perbankan Dalam Pembangunan Ekonomi: Sumber Pendanaan dan Memperlancar Transaksi Pembayaran”, dan “Problematika dan Upaya Optimalisasi Pajak Daerah”. Mulai tahun 2011 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Penulis dapat dihubungi di sony_hendra@yahoo.com.

